

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

1. PETUGAS PERSIDANGAN

Desk : 1
 Provinsi : Provinsi Papua
 Pimpinan Sidang 1 : Direktur TRPPB, Bapak Uke Moh. Hussein
 Pimpinan Sidang 2 : -
 Notulis Aplikasi : Luthfi Nashuka Dewi
 Notulis Offline : Sakinah Shabrina Dhea
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Plt. Sekertaris Badan 2. Kepala Bidang Sosial Budaya 3. Kepala idang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan 4. Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi 5. Kepala Bidang Perekonomian 6. Pelaksana pada Bidang Fisik dan Prasarana 7. Pelaksana pada Bidang Sosial Budaya	1. Kementerian Kesehatan 2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi	1. Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 2. Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat 4. Direktorat Pangan dan Pertanian 5. Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK 6. Direktorat Transportasi 7. Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika 8. Direktorat Kelautan dan Perikanan 9. Direktorat Politik dan Komunikasi 10. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		11. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan
--	--	---

2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	2	2	Sekolah	1. Kab. Biak Numfor 2. Kota Jayapura	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Kerja sama		Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		-	Kemendikbud: - Bisa di akomodir	Dit. APK : - Disepakati dan Diakomodir			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
2	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer di wilayah Papua (SDM-22)	2	2	Kabupaten/ Kota	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Kepulauan Yapen 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Sarmi 5. Kab. Keerom 6. Kab. Waropen 7. Kab. Supiori 8. Kab. Mamberamo Raya 9. Kota Jayapura	Kementerian Kesehatan	Diakomodir
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		01 - Transformasi Sosial		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		01 - Kesehatan untuk Semua	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer di wilayah Papua (SDM-22)			
Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas				
		-	Kementerian Kesehatan: - Di akomodir	Dit. KGM: - Di akomodir				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
3	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	2		unit	1. Kab. Biak Numfor 2. Kab. Jayapura	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Ditolak yang rehabilitasi balai benih ikan Untuk alat pakan ikan dapat	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO	RO			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	Kluster Komoditas Unggulan berbasis kawasan	disampaikan dalam forum DAK	
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
		<p>Dinas Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balai pengembangan air tawar di Berap (Jayapura) dan Bosnik (Biak) ke air laut yang mana kedua usulan sangat penting yang berkaitan pengadaan pakan budidaya ikan air tawar (Jayapura) dan laut (Biak) - Bibit untuk air tawar (Nila) dan laut yang mencakup (kepiting, ikan barramundi, dan rumput laut) sehingga ini basednya adalah komoditas 		<p>Kementerian KKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk 2025 bantuan difokuskan benih dan induk oleh karena itu akan diakomodir - Sarana dan BPI (bantuan alat pakan ikan) diarahkan ke DAK - Pakan belum masuk ke dalam renja 2025 - Diakomodir hanya benih dan induk - Bantuan alat pakan ikan belum masuk bantuan yang diarahkan kedalam DAK - Sedangkan untuk benih air laut arah kebijakannya belum ada - Akan diakomodir benih ikan air laut dan tawar dengan catatan pemerintah perlu menyiapkan dan Menyusun syarat penerima, KAK, dan RAB 		<p>Direktorat KKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statusnya dibahas lebih lanjut karena mengusulkan lebih dari 1 usulan (terkait bantuan benih dan induk) dan kedua rehabilitasi balai - Dalam Renja pemerintah pusat yang bisa diakomodir adalah pembelian benih dan indukan terutama ikan air tawar dengan catatan pemda bisa menyiapkan RC (khususnya penerima kelompok KAK, dan RAB) - Balai perikanan belum bisa diakomodir karena diarahkan ke DAK - Bantuan pakan meminta tanggapan dari Kementerian KP karena sejauh ini adanya bantuan benih 	Diakomodir hanya benih dan induk ikan air tawar dan laut (sesuai dengan Juknis Kementerian)

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

			<p>sesuai dengan Juknis dari Kementerian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi juga akan masuk dalam menu DAK - Yang ditolak adalah (1) alat Pakan yang mana ini juga belum masuk menu DAK. Selanjutnya akan disiapkan menu ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam DAK Kab/Kota ada menu sarana prasarana pakan mandiri - Sehingga yang diakomodir adalah benih ikan air tawar dan laut - Komoditas yang dapat di disampaikan dalam proposal 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
4	Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	18	0	Paket	1. Provinsi Papua 2. Kab. Jayapura 3. Kab. Kepulauan Yapen 4. Kab. Biak Numfor 5. Kab. Sarmi 6. Kab. Keerom 7. Kab. Waropen 8. Kab. Supiori	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Ditolak dengan catatan akan di arahkan ke DAK

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

				9. Kab. Mamberamo Raya 10. Kota Jayapura	
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
Program	Kegiatan	KRO		RO	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		Kluster Komoditas Unggulan berbasis kawasan	
Catatan dan Tanggapan					
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
<ul style="list-style-type: none"> - Sarana penangkapan dan pengembangan budidaya rumput laut - Perahu yang diusulkan namun disampaikan prioritas untuk - Rata-rata nelayan pengolahan kapal 5GT namun belum optimal - Budidaya dengan apartemen kepiting adapun ini akan diarahkan untuk sarananya 		Kementerian KKP: <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan kapal >15GT tidak bisa diakomodir keran biaya operasional yang sulit - Untuk kapa <15GT sudah masuk dalam menu DAK - Bantuan sarana detail seperti apa - Ada dalam Renja bantuan budidaya masyarakat hanya benih dan induk sehingga usulan ini akan masuk ke menu DAK 		Direktorat KP: <ul style="list-style-type: none"> - Usulan dibahas lanjut karena berdasarkan catatan melihat usulan ini ada 2, sarana produksi ikan air tawar dan sarpan perahu motor lebih dari 15 GT - Perahu motor >15Gt belum bisa diakomodir karena hasil evaluasi pemerintah daerah memberikan bantuan nelayan karena biaya operasional yang tinggi 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		- Untuk komoditas rumput laut dibutuhkan gudang, alat pengolahan di pengeringan				- Adapun kapal nelayan menggunakan DAK Tematik baru (DAK Kelautan perikanan) karena terkait dengan DAK ada beberapa tematik - Sarana produksi belum ada rincian produksinya. Sebelum menentukan APBN dari DAK perlu mengetahui jumlah produksi. Adapun untuk komoditas yang diusulkan dapat disampaikan dalam proposal	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
5	Sarana Perbibitan Ternak	2000	2000	Ekor	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Kepulauan Yapen 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Sarmi 5. Kab. Keerom 6. Kab. Waropen 7. Kab. Supiori 8. Kab. Mamberamo Raya	Kementerian Pertanian	Diakomodir dengan catatan menjadi "Ternak lainnya" berupa ternak babi

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

				9. Kota Jayapura	
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
Program	Kegiatan	KRO		RO	
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Sarana Perbibitan Ternak	
Catatan dan Tanggapan					
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
Dinas Peternakan: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk sapi potong bagi kabupaten keerom sebanyak 60 ekor - Kambing dari masyarakat sebnak 200 ekor (yapen 100 ekor dan kabupaten jayapura 100) - Ternak babi sebanyak 2000 ekor di Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, dan Kab. Biak Numfor 		Kementerian Pertanian: <ul style="list-style-type: none"> - Pada Rakortek diarahkan menjadi RO “ternak lainnya”. Namun, untuk kegiatan tersebut hanya ada di Kab. Jayapura dan Provinsi Papua - Sementara untuk ketersediaan usulan di Kab. Sarmi dan Kab. Biak Numfor akan dibahas dalam Musrenbang Kementerian Pertanian - Setelah di cek pada website, belum ada usulan dari Pemprov Papua perihal usulan tersebut 		Direktorat Pangan dan Pertanian: <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan hasil dari Rakortek bahwa RO diarahkan menjadi “Ternak Lainnya”. Hal tersebut dikarenakan RO sarana satuannya berupa unit. Sementara yang diusulkan adalah “Ekor” - Diakomodir: Bibit yang diminta adalah babi sebanyak 2000 ekor untuk Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, dan Kab. Biak Numfor 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
6	Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional dan Internasional	1	1	Paket	1. Kab. Kepulauan Yapen 2. Kab. Biak Numfor 3. Kab. Sarmi 4. Kab. Waropen	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Diakomodir dengan catatan Pemprov menyusun proposal untuk menyusun kegiatan ini		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Event)	Konferensi dan Event		Pelaksanaan Kegiatan (Events) Nasional dan Internasional			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		-	<p>Kememparekraf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan event Teluk Cenderawasih yang sudah berjalan terus dengan kepemilikan secara nasional - Untuk 2023 sudah di laksanakan yang Kememparekraf tidak ikut terlibat - Kememparekraf saat ini sedang menunggu keputusan terkait dengan anggaran karena adanya pemotongan anggaran - Terkait dengan event ini akan ada SK nasional antar kementerian (Kemkomarfes dan K/L lainnya sesuai kewenangan) 	<p>Direktorat IPEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karena ini adalah lintas kementerian dan yang memimpin adalah kememparekraf sehingga selanjutnya akan menunggu kepastian selanjutnya 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
7	Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan	9		Kabupaten/ Kota	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Kepulauan Yapen 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Sarmi 5. Kab. Keerom	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	Ditolak dengan catatan data IMM dapat dihasilkan berdasarkan hasil

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

					6. Kab. Waropen 7. Kab. Supiori 8. Kab. Mamberamo Raya 9. Kota Jayapura		perhitungan oleh Bappenas	
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi			Arah Pembangunan Nasional			
05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan			02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
Program	Kegiatan		KRO		RO			
Program Dukungan Manajemen	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan		Data dan Informasi Publik		Data dan Informasi Pendidikan dan Kebudayaan			
Catatan dan Tanggapan								
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas			
Bappeda Provinsi Papua - Usulan berkaitan dengan indikator human development index dari IPM menjadi IMM - Provinsi harus mengakomodir seluruh pembelajaran pendidikan		-			Dit. APK: - Untuk indikator IMM yang berkaitan dengan pendidikan - IMM dihitung Bappenas oleh sektor pendidikan dan kesehatan. - Data dari data makro RLS, HLS, dan komponen baru yaitu kualitas pendidikan			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

						<ul style="list-style-type: none"> - yang diukur dari assessment nasional - Kesulitan data yang belum dimiliki adalah assessment nasional yang mana sudah tersedia dan diakses oleh dinas pendidikan melalui lapor pendidikan (situs kemendikbud.go.id) - Perhitungannya dari Bappenas, berdasarkan hasil perhitungan dan data BPS - Daerah perlu memperhatikan hasil perhitungan tersebut. Data RLS, HLS, dan AN yang mana data tersebut tersedia - Tidak ada RO nya namun dapat dilaksanakan dalam forum-forum dan dapat meminta data hasil perhitungan bappenas 	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
8	Rekomendasi Pengendalian	1		Paket	Kab. Mamberamo Raya	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Diakomodir dengan

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

	Pembangunan Pembangkit Listrik	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		catatan Pemerintah Papua perlu menyiapkan RC yang dikoordinasikan dengan kementerian ESDM dan segera mengajukan usulannya		
		02 - Transformasi Ekonomi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				
		Program	Kegiatan		KRO		RO			
		Program Energi dan Ketenagalistrikan	Peningkatan Ketenagalistrikan		Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam		Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik			
		Catatan dan Tanggapan								
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga			Direktorat Sektor Bappenas			
<ul style="list-style-type: none"> - Penda perlu menyampaikan geotagging dengan rincian hubungan - 2 PLTMH sebagai lanjutan program dari Kementerian ESDM yang berada di Supiroi dan Kepulauan Yapen 		Kementerian ESDM: <ul style="list-style-type: none"> - RO nya perlu diperbaiki karena rekomendasi pengendalian ketenagaan listrik sesuai dengan arahan Bappenas yaitu pembangunan PLTMH - Di akomodir 			Direktorat KTI: <ul style="list-style-type: none"> - Karena Pembangunan PLTMH maka perlu perubahan nomenklatur RO merujuk pada pembangunan PLTMH dengan rekomendasikan titik lokasi dan area yang butuh aliran listrik 					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan							
9	PLTS Terpadu	6		Unit	1. Kab. Keerom 2. Kab. Mamberamo Raya	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Diakomodir dengan catatan hanya untuk			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		Mamberamo Raya dan usulan PLTS dapat segera disampaikan kepada Kementerian ESDM	
02 - Transformasi Ekonomi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
Program	Kegiatan	KRO		RO			
Program Energi dan Ketenagalistrikan	Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bantuan Peralatan / Sarana		PLTS Terpadu			
Catatan dan Tanggapan							
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Dinas Fispra: <ul style="list-style-type: none"> - Usulan PLTS ini ke pusat yang mana ada kabupaten yang belum dialiri listrik dan PLN. Oleh karena itu usulannya dibuat - 6 PLTS yang akan dibangun yaitu Mamberamo Raya (4 unit) yang merupakan daerah yang sulit terakses PLN, Sarmi (2 Unit) yang merupakan wilayah berdekatan dengan Mamberamo Raya - Pembangunan PLTS 4 unit Mamberamo raya hanya 2 unit saja karena sudah 		Kementerian SDEMP: <ul style="list-style-type: none"> - PLTS Sementara tahun 2025 belum diakomodir karena anggaran masih berfokus pada PLTMH di Supiori dan Biak yang meruapkan multi years contract - PLTS dapat diusulkan kembali untuk 2026 dengan kriteria tidak ada jaringan PLN selama 5 tahun dan meruapkan wilayah 3T - Daerah menyampaikan surat ke kementerian ESDM, jika sudah ada nanti akan 		Direktorat SDEMP: <ul style="list-style-type: none"> - RC akan di cek pengalokasiannya - PLTS ada RO nya nmaunnya kementerian SDEM, pengalokasiannya bisa di 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		<p>ada di Supiori (wilayah terluar Bepondi dan Waropen 1 unit</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLTMH di kabupateb sarmi - Initanya pembangunan ada 6 pembangkit listrik dengan rincian Mamberamo raya (2 unit) supirori (1 Unit), waropen (1 unit) - Apakah sumber anggarannya APBN ataukah DAK 	<ul style="list-style-type: none"> - Samapi saat ini, usuan PLTS ini belum disampaikan - Usulan ini tidak diakomoditar, karena usulan belum diterima. Namun berdasarkan data rasio elektrifikasi akan diakomodir mdi Mamberamo raya dengan catatan pemda harus melengkapi RC - Usulan terkait dengan PLTS ini dapat disampaikan melalui persuratan kepada Kementerian ESDM - Usulan ini akan masuk ke anggaran dana APBN Kementerian, namun karena ada keterbatasan anggaran maka hanya di akomodir Mamberamo Raya karena rasio elektrifikasi paling rendah di Provinsi Papua 				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

10	Surveilans Penemuan Kasus dalam Percepatan Eliminasi Malaria di Papua (LP-9)	9	9	Kabupaten/ Kota	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Kepulauan Yapen 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Sarmi 5. Kab. Keerom 6. Kab. Waropen 7. Kab. Supiori 8. Kab. Mamberamo Raya 9. Kota Jayapura	Kementerian Kesehatan	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pelayanan Publik Lainnya		Surveilans Penemuan Kasus dalam Percepatan Eliminasi Malaria di Papua (LP-9)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		-	Kementerian Kesehatan: - Confirm - Tidak ada perubahan pendanaan		Direktorat KGM: - Sudah tidak ada perubahan dan di akomodir		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
11	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi	1		Paket	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Kepulauan Yapen 3. Kab. Biak Numfor 4. Kab. Sarmi 5. Kab. Keerom 6. Kab. Waropen 7. Kab. Supiori 8. Kab. Mamberamo Raya 9. Kota Jayapura	Kementerian Sosial	Ditolak dengan catatan (1) Kementerian Sosil perlu mengakomodir kebutuhan yang di tahun 2024 (2)Pemerintah Papua segera menyampaikan usulan alat bantu dengan merinci jenis,
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif	
		Program	Kegiatan	KRO		RO	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		Progam Perlindungan Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Sistem Assesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi	jumlah, dan lokasi	
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan Kemensos berupa Biak umfor dan Kota Jayapura untuk kursi roda, kebutuhan pemakaman - Sebagaian bsar usulan ini adalah ketersediaan alat bantu untuk disabilitas 	<p>Kementerian Sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan alat bantu di tahun 2024 menjadi prioritas ada alokasi anggarannya khusus alat bantu namun saat pengajuannya perlu ada rincian jenis dan jumlahnya - Dalam SPBI dalam pagu indikatof alat bantu tidak menjadi prioritas kembali dan kemungkinan bisa jadi tidak dapat - Tahun 2024 masih ada anggaran sehingga Pemerintah Daerah masih bisa mengajukan kebutuhan alat bantu, sedangkan untuk 2025 tidak bisa iajukan karena dalam SPBI bukan menjadi prioritas 	<p>Direktorat PKPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau masih diteruskan bisa diakomodir Kemensos - Ada nomenklaturnya terutama untuk penyandang disabilitas - Perlu diubah nomenklatur kegiatan menjadi “asistensi rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas” 			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	50		Km	1.Kab. Waropen 2.Kab. Mamberamo Raya	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

**NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

PROVINSI PAPUA

		-		-		<p>Dit. Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas jalan ini bentuknya preservasi dan peningkatan jalan sehingga di rakortek disetujui dengan catatan mengusulkan 4 ruas yang disepakati yang mana ruas tersebut masih belum terkoneksi semua sehingga peningkatan jalan tersebut akan dilaksanakan pada segmen-segmen yang akan datang - Ruas tergambar ini memang belum tersambung semua, sehingga usulan ini akan dilanjutkan di tahun 2025 	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
13	Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Pos,	1	1	Kegiatan	Provinsi Papua	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Diakomodir dengan catatan penyesuaian
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

Telekomunikasi dan Penyiaran	03 - Transformasi Tata Kelola	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	06 - Tranformasi Digital		nomenklatur dan memasukan usulan dalam situs
	Program	Kegiatan	KRO	RO	
	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Akses Internet Papua dan Papua Barat	
	Catatan dan Tanggapan				
	Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
	-	-	Direktorat KTI: - Dibaca dari catatan bisa di akomodir namun secara nomenklatur kurang sesuai yang mana usulannya terkait dengan akses internet dan penuntasan TIK di daerah - Anggaran Kominfo yang menurun signifikan, sehingga nantinya akan berdampak dalam pembangunan infrastruktur TIK. Daerah dapat melakukan usulan peningkatan akses internet melalui Situs <i>pasti.baktikominfo.id</i> - Usulan tersebut tetap harus melalui situs yang		

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

						kemudian Kominfo akan melakukan pengecekan			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
14	Tata kelola komunikasi publik	1	1	Kegiatan	Provinsi Papua	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Diakomodir namun perbaikan nomenklatur menjadi "Pelatihan"		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		06 - Tranformasi Digital			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	SDM Vokasi Bidang Kominfo	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas					
		-	Kominfo: - Tata kelola ini kemarin adalah perbaikan nomenklatur karena permintaannya adalah pelatihan sehingga pelatihan digital talent di	Direktorat KTI: - Mengikuti dari arahan dan informasi dari Kominfo - Dari KTI confirm					

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

				<p>BPSDM nya Kominfo perlu menyesuaikan RO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan ini akan diakomodir - Kegiatan ini akan masuk dalam kegiatan di bagian pusdiklat yang didalamnya mencakup provinsi papua untuk PNS dan kelompok masyarakat lainnya 					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
15	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	1	1	Kegiatan	Kab. Biak Numfor	Kementerian Perhubungan	Diakomodir dengan catatan pemindahan Tagging ke Numfor		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara		Pengembangan Bandar Udara Numfor, Biak Numfor, Papua			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		<p>Dinas Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminal dan lingkungan karena harus memperhatikan pelayanan untuk penumpang - Taggingnya di Biak bukan di Numfor karena berbatasan dengan Papua Barat yang mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang seharusnya bisa masuk dalam pelayanan Provinsi Papua 	<p>Kementerian Perhubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait bandar udara di Biak, masterplan studinya di tahun 2015 yang belum disahkan - Di tahun 2024 sudah ada anggaran pengembangan bandara Numfor sisi darat dan udara. - Panjang runway 1755 - Fasilitasnya sudah lengkap di tahun 2024 melalui SBSN dan sudah bisa melayani ATR C600 - Pengembangannya mengacu pada Masterplan dan demand - Pengembangannya seperti apa karena di 2024 sudah dibangun sedangkan di 2025 dalam pagu indikatif ini masih alokasi yang terbatas - Di tahun 2024 di SBSN pembangunan terminal tidak masuk, sedangkan 2025 pengembangan terminal nya masih menunggu prioritas berdasarkan masterplannya (perlu review) 	<p>Direktorat Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat nomenklatur usulannya memang tidak spesifik lokasi dan dukungan apa yang diperlukan karena ada beberapa jenis dukungan (pengembangan baru dan layanan perintis udara) - Kalau ini pengembangan udara nantinya akan miss, karena sudah ada pengembangan udara - Bandara biak ini salah satu yang berpotensi, sehingga perlu adanya review kembali apakah di tahun 2025 perlu ada pembangunan atau tidak - Dengan adanya penurunan anggaran, bandara yang sudah dikembangkan 2024 based on contract apakah perlu di kembangkan kembali? Karena ada bandara lain yang perlu di kembangkan - Terminal ini apakah sudah urgent - Numfor potensial namun berbiscara pagu tidak masuk, namun karena potensi yang besar ini 	
--	--	---	--	--	--

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

			<ul style="list-style-type: none"> - Perlu ada review perencanaannya terlebih dahulu - Untuk 2025 masih mengusulkan dokumennya terlebih dahulu - Belum teralokasi dalam pagu indikatifnya, namun memang sudah masuk dalam longlist - Masterplan yang direview adalah Masterplan yang sudah pengesahan - Adapaun pengesahan Masterplan tersebut disahkan oleh Kemenhub - Proses masterplan ini belum ada pengesahan sehingga 	<p>kemudian di rekomendasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah bisa tetap diakomodir dengan catatan perlu diangkat dalam TM di minggu depan dengan kemenhub 			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
16	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	1	1	Kegiatan	Kab. Sarmi	Kementerian Perhubungan	Diakomodir
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		11 - Stabilitas Ekonomi Makro	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		Program	Kegiatan	KRO	RO		
		Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi		
Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		-	Kementerian Perhubungan: - Sudah diakomodir dalam rencana usulan SBSN di tahun 2025 namun masih menunggu kelengkapan data dan RC nya - SBPI sudah masuk - Karena ini ada <i>refreshment</i> maka diperlukan surat penghapusan	Direktorat Transportasi: - Pelabuhan Sarmi saat ini masih bisa di akomodir			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
17	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	100		Unit	1.Kab. Jayapura 2.Kab. Kepulauan Yapen 3.Kab. Biak Numfor 4.Kab. Sarmi 5.Kab. Keerom 6.Kab. Waropen 7.Kab. Supiori	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Diakomodir dengan catatan perlu memperjelas RO dan perlu diusulkan melalui Sibaru

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

				8.Kab. Mamberamo Raya 9.Kota Jayapura	
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif	
Program	Kegiatan		KRO		RO
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		Bantuan PSU Bidang Perumahan
Catatan dan Tanggapan					
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas	
<ul style="list-style-type: none"> - 100 unit rumah untuk 8 kabupaten di Provinsi Papua dan dalam rakortek sudah diskusi - Penyediaan PSU, penyediaan rumah baru dan rumah susun 		Kementerian PUPR <ul style="list-style-type: none"> - Dalam BA berupa Usulan bantuan Prasarana Sarana Perumahan (PSU) - Terdapat RO tersendiri sesuai dengan kebutuhan - Data base di Kementerian PU, provinsi papua sudah ada Usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 21.251 unit - Selain itu sudah masuk juga bantuan PSU sudah 		Direktorat Perkim: <ul style="list-style-type: none"> - Perumahan swadaya sedangkan dalam Krisna tertulis antuan stimulan rumah sehingga perlu penyesuaian RO - Pemda menyiapkan lahan, dan pendampingan, dan penerima bantuan by name by adress - Dapat diakomodir dengan rogram ini namun perlu 	

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

				masuk RKB Prioritas sebanyak 614 unit - Diakomidir saja namun disesuaikan saja RO nya dengan catatan menyiapkan RC dan diusulkan ke sisten SIbaru		ada pandangan dari kementerian PU			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	Kawasan Jagung	349	Menyesuaikan	Ha	Kab. Keerom	Kementerian Pertanian	Diakomodir		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		05 - Penerapan Ekonomi Hijau			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Sarana Pengembangan Kawasan		Kawasan Jagung			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		-		Kementerian Pertanian: - Keerom sudah sesuai dengan kesepakatan rakortek		Direktorat Pangan Pertanian: - Diakomodir dalam kabuapten keerom - Mohon perlengkapan dokumen			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

				- Volume akan mengikuti pagu anggaran yang saat ini turun jauh		- Berapa anggaran yang diperlukan untuk pengembangan kawasan jagung di Keerom dari Kementan			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
19	Promosi Terpadu	3		Paket	1. Kab. Biak Numfor 2. Kab. Supiori 3. Kota Jayapura	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Ditolak karena usulan di cabut		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		Program Energi dan Ketenagalistrikan	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Bantuan Peralatan / Sarana		PLTS Terpadu			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

		-	-	-	
--	--	---	---	---	--

10. REKAPITULASI

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Direkomendasikan	14
Tidak Direkomendasikan	6
Tidak Terbahas	0

11. CATATAN TAMBAHAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

1. Papua dalam forum musrenbangnas dapat melakukan remedial berupa tambahan usulan yaitu benih ikan air tawar dan air laut (Diakomodir dengan catatan daerah perlu menyampaikan kelengkapan RC)
2. Kewenangan SMA pindah ke kab/kota sesuai PP 106/2021, namun jika melihat dalam Kepmendagri 900 masih ada untuk menu provinsi. Saat ini Provinsi masih menangani 2 SMA dan 3 SMK, namun sudah tidak mendapat alokasi dari Skema DAK. Diharapkan sinergi pembiayaan provinsi dan kab/kota
3. UU 2/2021, sudah ada pemanfaatan hutan rakyat yang dikelola rakyat, namun jika peraturan sektoral belum bisa karena UU 2/2021 dan turunannya masih memberikan untuk pengelolaannya pihak lain sehingga perlu ada sinergitas
4. Biak dijadikan hub maritim Papua, namun konektivitas belum maksimal karena intervensi pusat terlalu tinggi

NOTULENSI
PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

PROVINSI PAPUA

5. Pengembangan jagung khusus provinsi induk tidak memiliki komoditas khusus yang menghasilkan PAD Besar, keerom dan Jayapura sudah ada kelapa sawit yang besar, sehingga komoditas ini bisa menjadi perhatian.
6. Arahan presiden, Sarmi diarahkan untuk pengembangan komoditas kelapa dan sukun yang tidak berbiji karena berpotensi memiliki pasar besar yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat
7. Anggaran Otsus dibagi 2 (1% dan 1,25%) perlu didiskusikan sehingga UU sektoral dan UU umum saling bersinergi
8. DBH sawit bisa diusulkan untuk bisa digunakan langsung untuk membantu masyarakat adat ulayat setempat
9. Tahun 2001 sampai 2021 negara memanfaatkan dana sebesar 1007 T (700T anggaran K/L, 200T anggaran DTI DBH dll, serta dana otsus) serta tidak diikuti dengan pembangunan yang signifikan, sehingga anggaran sebaiknya dapat dipisah secara tajam sesuai dengan kewenangan masing-masing
10. Diharapkan Kemendagri penuh kehati-hatian dalam mengembangkan kelembagaan di Papua